

Analisis Ketimpangan Investasi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat tahun 2015-2020

¹ Ulul Hidayah, Universitas Terbuka, Indonesia

² Anggelina Delviana Klau, Universitas Timor, Indonesia

³ Suci Rahmawati Prima, Universitas Terbuka, Indonesia

Informasi Naskah

Submitted: 14 April 2022;

Revision: 21 Juni 2022;

Accepted: 29 Juni 2022.

Kata Kunci:

ketimpangan, investasi, perbatasan

Abstract

Investment is one of the essential factors in regional development because it can increase the attractiveness of a location for doing business and encourage economic growth. Increased investment is needed to encourage regional development in Indonesia, including the border area of West Kalimantan. This study aims to analyze the level of inequality in development investment in the border and non-border areas of West Kalimantan and examine more deeply the level of inequality within the region and between regions in the border area of West Kalimantan. The inequality analysis method used in this study is the Williamson Index and Theil Entropy Index. The analysis results show that the per capita investment inequality in non-border areas is higher than in border areas. Inequality in per capita investment in border areas is in the moderate category, but this inequality has tended to increase in the last five years. The investment disparity between the five regencies in the border area is higher when compared to the level of investment disparity between the border and non-border herd.

Abstrak

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan wilayah karena dapat meningkatkan daya tarik suatu lokasi untuk berbisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Investasi diperlukan untuk mendorong pengembangan wilayah di Indonesia termasuk wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan investasi pembangunan di wilayah perbatasan dan non-perbatasan Kalimantan Barat, serta mengkaji lebih dalam tingkat ketimpangan dalam wilayah dan antar wilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Metode analisis ketimpangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan investasi perkapita di wilayah non-perbatasan lebih tinggi dibandingkan wilayah perbatasan. Ketimpangan investasi perkapita di wilayah perbatasan berada pada kategori sedang, namun pada kurun waktu 5 tahun terakhir angka ketimpangan ini cenderung meningkat. Ketimpangan investasi antar lima kabupaten di kawasan perbatasan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan investasi antara kawasan perbatasan dan non perbatasan.

* *Corresponding Author.*

Ulul Hidayah, e-mail: ulul-hidayahl@ecampus.ut.ac.id

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam wilayah suatu negara yang berhimpitan dengan negara lain. Batas wilayah antar negara meliputi daerah perairan dan daratan, dalam konteks perbatasan negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan-kecamatan terluar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, 2008). Kawasan perbatasan ini sebagai satuan unit geografi yang terletak disekitar garis batas politik administrasi (antar negara dan antar daerah) yang karena kedekatan geografisnya memiliki hubungan fungsi yang erat namun dalam interaksinya terikat oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Muta'ali, 2015). Kawasan perbatasan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan Indonesia. Perhatian terhadap kawasan perbatasan ditunjukkan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga yang secara khusus dan fokus berwenang mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan., 2010).

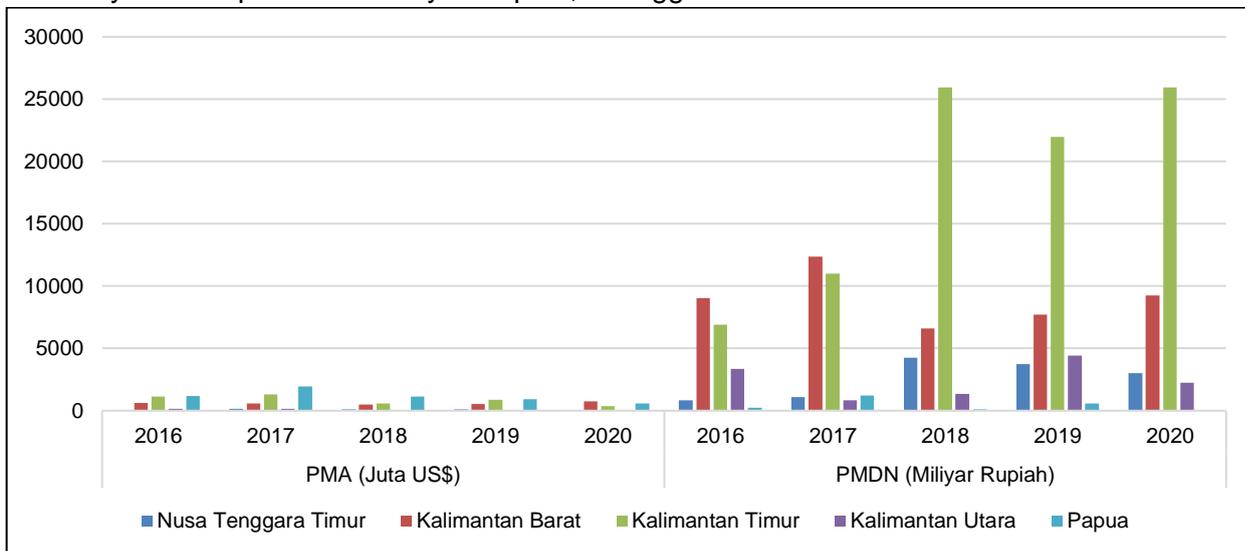
Pembangunan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis menjadi suatu keharusan agar kebijakan terhadap kawasan ini menjadi efektif. Pembangunan perbatasan memiliki peran ganda dari sisi pertahanan keamanan serta dari sudut pandang sosial, budaya, dan ekonomi (Cassidy et al., 2017). Pembangunan kawasan perbatasan bertujuan untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang negara menjadi kawasan yang aman dan tertip serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diharapkan pembangunan perbatasan dapat menjamin negara kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Visi tersebut adalah dasar dalam penyusunan kebijakan strategis dan program pengembangan kawasan perbatasan yang bertujuan agar kawasan perbatasan mampu meningkatkan ekonomi di daerah, mampu menurunkan ketimpangan dengan kawasan sekitarnya serta melakukan sinergi dengan perkembangan kawasan di negara tetangga.

Selain sebagai pintu gerbang negara, kawasan perbatasan memiliki banyak potensi sumber daya alam (SDA) yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Potensi yang dimiliki oleh kawasan perbatasan bernilai ekonomis yang sangat besar, diantaranya potensi tambang dan mineral, hutan, serta perikanan dan kelautan yang terbentang di sepanjang dan di sekitar perbatasan. Hal ini kemudian dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kepentingan utama pembangunan kawasan perbatasan selain meningkatkan produktivitas, merangsang konektivitas, pada jangka panjang diharapkan akan mengurangi kemiskinan (Priyarsono, 2017).

Terdapat lima elemen kunci kebijakan dalam pengembangan kawasan perbatasan yaitu komplementaritas ekonomi, intervensi pemerintah, kemampuan kerangka kerja institusi, faktor budaya yang berimplikasi pada pengembangan perbatasan dan ketertarikan sektor swasta (investasi) (Wu, 2001). Pengembangan wilayah perbatasan bergantung pada faktor lokasi yang menjanjikan karena adanya faktor kedekatan (*proximity*), kemudahan transportasi, kerjasama pemerintah. Selain itu yang utama adalah lokasi dan komplementaritas sehingga dapat menarik sektor swasta berinvestasi (Kurniadi, 2009).

Investasi dalam pembangunan wilayah adalah motor penggerak kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan-lapangan kerja baru yang sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Investasi memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan pemerataan pendapatan dan lapangan kerja (Yuliadi, 2012). Perbedaan akumulasi kapital atau investasi disuatu wilayah akan mendorong perbedaan pertumbuhan ekonomi dan kesejangan wilayah (Sarungu, 2015). Ketimpangan antar wilayah dapat dihindari dengan pengembangan investasi yang difokuskan pada sektor-sektor basis yang memiliki efek pengganda besar dalam pembangunan (Nurhayani et al., 2015).

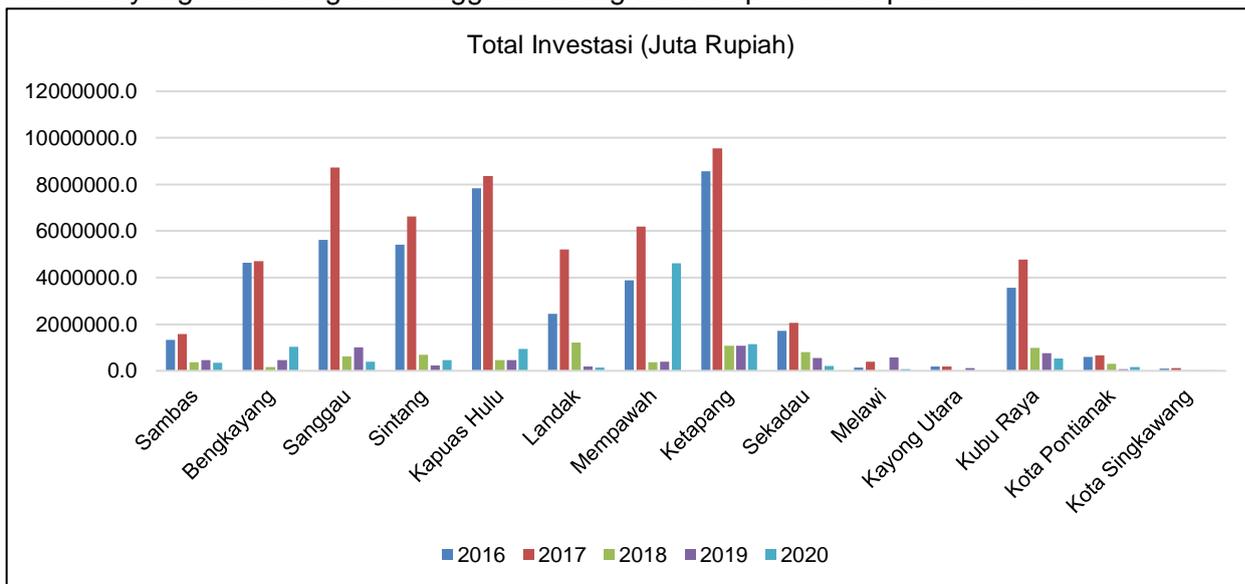
Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu wilayah perbatasan darat di Indonesia yang memiliki kecenderungan nilai investasi terus naik jika dibandingkan dengan wilayah perbatasan darat lainnya baik investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Tabel 1). Pada tahun 2020, Kalimantan Barat memiliki nilai investasi PMA paling tinggi yaitu 759.3 juta US\$ atau sekitar 25 Miliar Rupiah. Sedangkan nilai investasi PMDNnya mencapai 9256.5 Miliar Rupiah, tertinggi kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur.



Sumber: BPS Indonesia Tahun 2020

Gambar 1 Nilai Investasi PMA dan PMDN Wilayah Perbatasan Darat Indonesia.

Gambar 1 menggambarkan kondisi investasi Kalimantan Barat jika dibandingkan dengan 5 wilayah perbatasan lainnya di bagian tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2020, Kalimantan Barat memiliki nilai investasi PMA paling tinggi yaitu 759.3 juta US\$ atau sekitar 25 Miliar Rupiah. Sedangkan nilai investasi PMDNnya mencapai 9256.5 Miliar Rupiah, tertinggi kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur. Namun jika melihat besarnya nilai investasi pada level kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat justru menunjukkan tren penurunan investasi di tahun 2018-2020. Dimana kabupaten-kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat memiliki nilai investasi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten non-perbatasan.



Sumber: BPS Indonesia Tahun 2020

Gambar 2. Total Investasi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2020

Meski demikian yang menarik adalah secara keseluruhan wilayah perbatasan Kalimantan barat yang terdiri dari 5 kabupaten mampu menyumbang sekitar 45% dari total investasi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat (Gambar 2). Hal ini merupakan kontribusi wilayah perbatasan yang cukup besar terhadap provinsi Kalimantan Barat. Sehingga menarik dikaji kondisi ketimpangan investasi pembangunan di wilayah perbatasan dan non-perbatasan Kalimantan Barat. Keterbaruan dari penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam tingkat ketimpangan dalam wilayah dan antar wilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Selama ini ketimpangan dinilai dari produksi ekonomi suatu wilayah, namun pada penelitian ini mencoba menilai ketimpangan dari input kegiatan ekonomi yakni investasi. Implikasi dengan adanya analisis ini dapat diperoleh gambaran ketimpangan yang menjadi bahan evaluasi dari proses pembangunan perbatasan di Kalimantan Barat pada periode Nawacita.

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis ketimpangan investasi di wilayah perbatasan dan non perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah perbatasan di Kalimantan Barat terdiri dari Kabupaten Sambas, Bengkayan, Sanggau, Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan kawasan non perbatasan di Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Landak, Mempawah, Ketapang, Kayong Utara, Melawi, Kubu Raya, Sekadau, Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan data-data yang diperoleh secara sekunder. Data yang digunakan adalah realisasi investasi yang meliputi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri selama periode 2015-2020. Serta dibutuhkan data pendukung seperti jumlah penduduk masing-masing kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun yang sama yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk mendukung hasil analisis yang dilakukan studi literatur dari artikel ilmiah dan buku.

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis Indeks Williamson dan Indeks Ektropi Theil. Indeks Williamson adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Analisis Indeks Williamson ini dikembangkan oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1965 untuk melihat hubungan ketimpangan wilayah dan pembangunan ekonomi di negara maju dan sedang berkembang (Muta'ali, 2015). Pada penelitian ini menggunakan metode analisis yang sama dengan pendekatan variabel yang berbeda yaitu nilai investasi perkapita. Indeks Williamson akan menghasilkan nilai indeks yang sama dengan 0 jika nilai variabel amatan sama dengan nilai rata-ratanya. Jika nilai indeks = 0 berarti tidak ada ketimpangan antar wilayah. Sebaliknya, jika nilai indeks lebih dari 0 maka terjadi kesenjangan antar wilayah. Semakin besar nilai indeks maka semakin besar kesenjangan suatu wilayah (Rustiadi et al., 2009). Adapun yang menjadi rumus dari Indeks Williamson adalah:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 p_i}}{\bar{Y}} \dots \dots \dots (1)$$

- IW = Indeks Williamson
- \bar{Y} = Rata-rata investasi perkapita
- Y_i = Investasi perkapita wilayah i
- p_i = jumlah penduduk di kabupaten/kotai i / total jumlah penduduk di wilayah perbatasan

Hasil dari analisis Indeks Williamson dapat di dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria berikut (Kurniasih, 2013):

- Indeks < 0,39 = ketimpangan rendah
- Indeks 0,4 – 0,69 = ketimpangan sedang
- Indeks 0,7 – 1 = ketimpangan tinggi
- Indeks > 1 = ketimpangan sangat tinggi

Indeks Entropi Theil digunakan untuk menghitung ketimpangan investasi antar wilayah dan dalam wilayah. Ketimpangan antar wilayah memberikan gambaran ketimpangan antara wilayah perbatasan dan non-perbatasan. Sedangkan ketimpangan dalam wilayah memberikan gambaran tingkat ketimpangan dalam wilayah perbatasan. Konsep Entropi merupakan teori informasi dalam mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri pada suatu wilayah. Semakin tinggi nilai dari indeks maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan antar wilayah dan dalam wilayah amatan. Indeks Entropy Theil dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut (Kuncoro, 2004):

$$I(y) = \sum_{i=0}^N Y_i \log \left(\frac{Y_i}{X_i} \right) + \sum_{j=0}^N Y_j \log \left(\frac{Y_j}{X_j} \right) \dots \dots \dots (2)$$

Di mana,

- I(y) : Indeks entropi Theil
- Y_i : Investas per kapita wilayah i / total investasi perkapita
- X_i : Jumlah penduduk wilayah i / total penduduk
- Y_j : Rata-rata investas per kapita provinsi
- X_j : Jumlah penduduk provinsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Investasi di Provinsi Kalimantan Barat

Salah satu indikator pembangunan perekonomian suatu wilayah adalah besaran nilai investasi. Dalam penelitian Andhiani et al., (2018) mengatakan bahwa investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan. Salah satu faktor utama penggerak roda perekonomian suatu negara adalah akumulasi modal dari berbagai bentuk investasi baru yang didalokasikan pada modal atau sumber daya manusia, peralatan fisik, dan tanah (Todaro, 2013). Selanjutnya Sulistiawati (2012) menambahkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari suatu negara dapat dicapai salah satunya melalui besarnya aliran investasi ke nagara yang bersangkutan. Di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data realisasi investasi tahun 2015 sampai 2020 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan di wilayah non perbatasan nilai investasi lebih besar dibandingkan wilayah perbatasan. Investasi di wilayah Perbatasan dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan signifikan yaitu tahun 2016 jumlah investasi meningkat sebesar Rp.6.531.886,00 menjadi Rp.24.841.542,00 kemudian meningkat lagi sebesar Rp.5.150.723,00 menjadi Rp.29.992.265,00 di tahun 2017 namun pada tahun 2018 realisasi investasi menurun menjadi Rp.2.293.116,00 kemudian di tahun 2019 meningkat sebesar Rp.302.634,00 menjadi Rp.2.595.951,00 selanjutnya di tahun 2020 meningkat menjadi Rp.3.154.478,00. Wilayah Non perbatasan dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya namun di tahun 2018 realisasi investasi menurun sebesar Rp.24.315.625,00 menjadi Rp.4.790.207,00 di tahun 2018. Kemudian menurun lagi di tahun 2019 menjadi Rp.3.700.424,00, di tahun 2020 meningkat menjadi Rp.6.861.258,00.

Berdasarkan penuturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota pada Provinsi Kalimantan Barat dan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal 2019 mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan realisasi investasi di Kalimantan Barat pada tahun ini yaitu pengaruh ekonomi global, adanya perang dagang AS dan Cina serta fluktuasi nilai tukar Dollar US terhadap mata uang regional, kemudian adanya implementasi kebijakan dengan pelayanan perijinan yang dilaksanakan melalui *Online Single Submission (OSS)* serta adanya ketersediaan infrastruktur dasar. Kendala dan permasalahan tersebut mengakibatkan iklim investasi belum kondusif sehingga pelaku usaha banyak yang menunda kegiatan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya.

Tabel 1.
Realisasi Investasi (Juta Rupiah) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2020

Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sambas	1.056.260	1.326.682	1.567.437	357.267	454.912	348.390
Bengkayang	2.497.931	4.643.956	4.698.829	157.544	449.308	1.021.268
Sanggau	5.319.077	5.630.414	8.725.169	616.186	1.002.551	385.826
Sintang	4.532.471	5.415.020	6.632.871	692.801	224.794	449.873
Kapuas Hulu	4.903.917	7.825.470	8.367.959	469.318	464.386	949.120,1
Wilayah Perbatasan	18.309.656	24.841.542	29.992.265	2.293.116	2.595.951	3.154.478
Landak	1.603.690	2.438.427	5.205.328	1.206.110	181.652	131.042
Mempawah	3.728.246	3.887.700	6.186.203	376.179	382.077	4.626.489
Ketapang	6.351.003	8.565.954	9.549.633	1.069.343	1.075.464	1.134.836
Sekadau	1.340.525	1.712.430	2.052.957	800.580	556.387	213.127
Melawi	131.356	151.139	381.986	29.968	575.842	64.289
Kayong Utara	186.000	186.004	186.024	3	120.593	0
Kubu Raya	2.544.385	3.565.988	4.775.041	986.739	747.056	527.106
Kota Pontianak	578.049	585.856	656.879	307.647	60.183	163.415
Kota Singkawang	66.941	96.179	111.781	13.639	1.170	952
Wilayan Non-Perbatasan	16.530.195	21.189.677	29.105.832	4.790.207	3.700.424	6.861.258

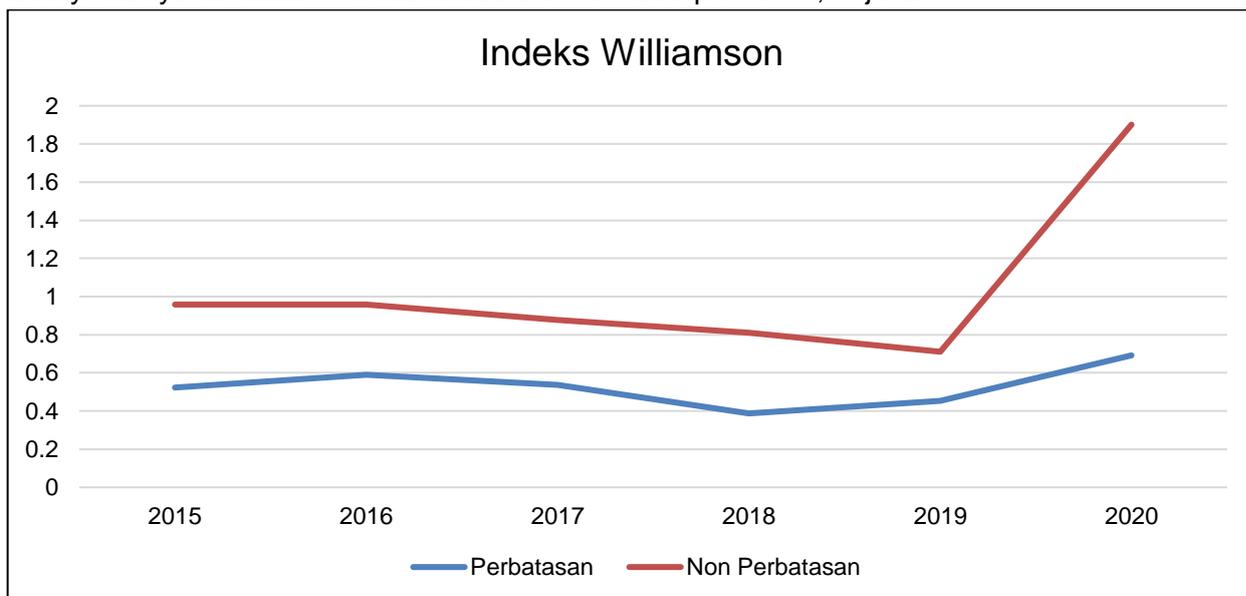
Analisis Ketimpangan Investasi Perkapita di Wilayah Perbatasan dan Non Perbatasan Kalimantan Barat

Ketimpangan wilayah dapat disebabkan oleh salah satu faktor yaitu investasi (Jhingan, 2014). Di wilayah-wilayah maju cenderung memiliki perputaran investasi yang bagus, peningkatan permintaan akan meningkatkan investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan yang selanjutnya akan meningkatkan investasi pula. Investasi pada wilayah-wilayah terbelakang sebaiknya diarahkan pada pusat-pusat pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal. Ishak et al., (2018) menambahkan bahwa belanja modal dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan meningkatnya peningkatan ketimpangan di suatu wilayah. Ketimpangan antar wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang disebabkan oleh adanya kelangkaan modal. Ketimpangan pembangunan antar wilayah disebabkan oleh adanya tingginya pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu (Syafrizal, 2008). Namun sebaliknya rendahnya konsentrasi ekonomi di suatu wilayah rendah maka akan menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat rendah dan dalam jangka panjang akan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan.

Hasil analisis Indeks Williamson total investasi perkapita di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 hingga 2020 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan investasi yang terjadi cenderung memiliki trend meningkat. Hal ini terjadi pada kedua wilayah baik pada wilayah perbatasan maupun non perbatasan. Ketimpangan dengan tren meningkat mengindikasikan wilayah yang tinggi investasi semakin meningkat dan wilayah yang rendah investasi semakin menurun. Sehingga gap ketimpangan semakin lebar.

Jika dibandingkan maka ketimpangan investasi perkapita pada wilayah perbatasan cenderung lebih rendah daripada wilayah non perbatasan. Tingkat ketimpangan investasi perkapita di wilayah perbatasan rata-rata berada pada kategori sedang. Ketimpangan terendah ada di tahun 2018 dengan nilai IW 0,39 sedangkan nilai ketimpangan tertinggi ada di tahun 2020 dengan nilai IW 0,69. Tingginya ketimpangan investasi di tahun 2020 disebabkan karena adanya perbedaan total nilai investasi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Pada tahun 2020 di

Kabupaten Bengkayan nilai total investasi mencapai Rp1.021.267,6 juta, sedangkan wilayah lainnya hanya memiliki total nilai investasi sebesar Rp400.000,00 juta.



Sumber: Hasil Analisis, 2021

Gambar 3. Tingkat Ketimpangan Investasi Perkapita di Provinsi Kalimantan Barat dengan Indeks Williamson.

Hasil analisis indeks williamson total investasi perkapita pada wilayah non perbatasan menunjukkan bahwa nilai indeks williamson lebih dari 0 artinya bahwa terjadi juga ketimpangan yang tinggi di wilayah non perbatasan dari tahun 2015 hingga 2020. Ketimpangan investasi perkapita di wilayah non perbatasan cenderung berada dalam katogori tinggi dan bahkan di tahun 2020 berada pada kategori yang sangat tinggi. Tahun 2015 nilai IW sebesar 0,95 kemudian tahun 2016 juga memiliki nilai IW 0,95, tahun 2017 IW menurun menjadi 0,87 kemudian 2018 0,80, tahun 2019 nilai IW menurun menjadi 0,71 selanjutnya di tahun 2020 meningkat menjadi 1,90. tingginya ketimpangan investasi pada tahun 2020 dikarenakan ada beberapa wilayah yang tidak memiliki investasi seperti Kabupaten Kayong Utara, namun wilayah lainnya mampu menarik investasi pembangunan hingga mencapai Rp 4.626.488,8 juta yaitu Kabupaten Mempawah.

Selain menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan investasi dapat juga dikukur dengan menggunakan analisis Indeks Entropi Theil. Indeks Entropi Theil memiliki besaran nilai yang berada di antara 0 sampai 1. Semakin besar (mendekati 1) hasil pengukuran Entropi Theil maka ketimpangan akan semakin tinggi atau semakin tidak merata, dan sebaliknya. Pada analisis dengan menggunakan indeks entropi theil diperoleh informasi besaran nilai ketimpangan investasi perkapita antar wilayah dan dalam wilayah.

Tabel 2.

Variasi dan Keragaman rata-rata investasi/kapita di Provinsi Kalimantan Barat 2015-2020

Tahun	Antar Wilayah	Dalam Wilayah	Investasi/kapita di kawasan perbatasan (Rp)		
			Rata-Rata	Maksimum	Minimum
2015	0.017	0.044	11164.15	19934.78	2019.17
2016	0.021	0.056	15768.30	31251.88	2520.45
2017	0.013	0.045	18030.59	32852.63	2959.19
2018	0.003	0.012	1222.76	1812.15	626.87
2019	0.001	0.021	1408.51	2132.07	536.78
2020	0.004	0.042	1948.05	3757.27	553.08

Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa ketimpangan investasi perkapita di wilayah perbatasan didominasi oleh ketimpangan dalam wilayah. Artinya terjadi ketimpangan yang lebih tinggi diantara 5 kabupaten yang ada di wilayah perbatasan. Dari kelima kabupaten yang ada di perbatasan, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki nilai investasi yang paling tinggi rata-rata investasi perkapita selama tahun 2015-2020 adalah Rp.15.228,84. Sedangkan nilai investasi terendah ada di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas memiliki nilai rata-rata investasi perkapita selama tahun 2015-2020 adalah Rp1.595,31, nilai tersebut hanya 10% dari investasi perkapita yang ada Kabupaten Kapuas Hulu. Di daerah-daerah yang memiliki pembangunan infrastruktur baik, pasokan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja yang memadai, kualitas tenaga kerja yang terampil, tingkat penerapan IPTEK yang baik akan mendorong naiknya investasi (Golaydo & Soboleva, 2015). Sedangkan wilayah yang kurang berkembang akan menyebabkan tingkat investasi rendah. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah perbatasan yang memiliki kondisi pembangunan yang relatif lebih baik karena memiliki infrastruktur yang baik serta memiliki keunggulan dalam sektor pertanian dan kehutanan yang dikelola dengan baik. Pengelolaan sumberdaya alam dengan baik mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Rahim et al., (2021) yang menyatakan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tingkat pembangunan Kawasan perbatasan yang tertinggi di Kalimantan Barat. Sedangkan Kabupaten Sambas memiliki kondisi pembangunan yang lebih terhambat karena masih terbatasnya pembangunan infrastruktur serta kondisi sektor perekonomian yang belum tumbuh cepat dan berdaya saing dan cenderung lambat di sehingga berdampak pada pembangunannya yang relatif terhambat (Mulyati, 2013). Perbedaan karakteristik dan daya saing wilayah merupakan penyebab semakin lebarnya ketimpangan investasi.

Adanya investasi disuatu wilayah secara tidak langsung akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Berbagai penelitian baik di dalam dan luar telah menunjukkan hasil yang sama bahwa peningkatan investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini kemudian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara agregat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Sulistiawati, 2012). Penyerapan investasi yang banyak belum cukup untuk dapat meningkatkan pertumbuhan wilayah, namun harus diimbangi dengan penentuan lokasi investasi yang tepat (Nistor, 2012). Strategi yang diperlukan dalam mendukung kebijakan investasi secara efektif diantaranya adalah peningkatan iklim usaha, insentif pajak, klaster, zona ekonomi khusus, pemasaran wilayah, kemitraan publik-swasta, dan dukungan proyek investasi prioritas (strategis) (Nikolaev & Makhotaeva, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Investasi dibutuhkan sebagai pendorong pembangunan suatu wilayah dengan investasi yang semakin tinggi maka roda pembangunan akan bergerak terus sehingga mampu memberikan dampak efek berganda bagi pembangunan. Di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data realisasi investasi tahun 2015 sampai 2020 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan di wilayah non perbatasan nilai investasi lebih besar dibandingkan wilayah perbatasan. Selama periode waktu tersebut terjadi penurunan nilai investasi yang cukup signifikan di tahun 2018. Penurunan nilai investasi disebabkan oleh adanya pengaruh ekonomi global, posisi nilai tukar rupiah yang tidak stabil, serta adanya perbaikan sistem investasi yang menyebabkan iklim investasi belum kondusif. Secara umum ketimpangan investasi perbatasan di Kalimantan Barat lebih rendah daripada wilayah non perbatasan. Ketimpangan diperbatasan didominasi oleh ketimpangan antar wilayah di dalam kawasan perbatasan.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian agar menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu perlu mendorong peningkatan investasi yang diarahkan pada daerah perbatasan yang relatif belum maju sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan pemerataan. Selanjutnya untuk pemerintah juga perlu peningkatan pembangunan pada semua wilayah perbatasan pada semua aspek pembangunan wilayah. Penelitian ini hanya melihat bagaimana ketimpangan investasi antar wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat tanpa melihat besar pengaruh dan korelasi ketimpangan investasi dengan ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat memberikan penjelasan lebih terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 26–34.
- Cassidy, K., Yuval-Davis, N., & Wemyss, G. (2017). Debordering and everyday (re)bordering in and of Dover: Post-borderland borderscapes. *Political Geography*, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.04.005>
- Golaydo, I. M., & Soboleva, Y. P. (2015). Assessment and management of factors of the regional investment potential. *Asian Social Science*, 11(7), 240–251. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n7p240>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, (2008). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan., (2010).
- Ishak, J. F., Alamanda, A. R., & Kusumah, R. W. R. (2018). The Effect of Capital Expenditure and Investment on Income Inequality,. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 3(1), 51–58. <https://doi.org/10.33062/ajb.v3i1.177>
- Jhingan, M. L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pres.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi. Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga.
- Kurniadi, D. (2009). *Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara : Memacu Pertumbuhan Ekonomi*. Universitas Diponegoro.
- Kurniasih, E. P. (2013). Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet. *Jurnal Eksos*, 9(1), 36–48.
- Mulyati, S. (2013). *Perubahan Struktur Dan Tipologi Ekonomi Kabupaten Sambas*. Universitas Tanjungpura.
- Muta'ali, L. (2015). *Pengembangan Kawasan Perbatasan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPGF) Universitas Gadjah Mada.
- Nikolaev, M. ., & Makhotaeva, M. Y. (2019). Efficiency Factor Of Regional Investment Policy. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences*, 550–559.
- Nistor, P. (2012). FDI and Regional Disparities Growth in Romania. *Procedia Economics and Finance*, 3(12), 740–745. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00223-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00223-7)
- Nurhayani, Hodijah, S., & Bhakti, A. (2015). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Dan Hubungannya Dengan Investasi Di Provinsi Jambi Tahun 2002-2014. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2), 302–311. <https://repository.unja.ac.id/14927/2/Turnitin.pdf>
- Priyarsono, D. S. (2017). Membangun dari Pinggiran: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(1), 42–52. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.1.42-52>
- Rahim, D. A., Priyarsono, D. S., Rustiadi, E., & Syaikat, Y. (2021). Analysis of Development Index of Land Border Area through Composite Index Construction. *Mimbar*, 37(2), 130–141.
- Sarungu, J. J. (2015). Pola Penyebaran Spasial Investasi Di Indonesia: Sebuah Pelajaran Dari Masa Lalu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 9(1), 61. <https://doi.org/10.23917/jep.v9i1.1031>

- Sulistiwati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(1), 29–50.
- Syafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori & Aplikasi*. Baduose Media.
- Todaro, M. (2013). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.
- Wu, C.-T. (2001). Cross-Border Development in a Changing World: Redefining Regional Development Policies. *New Regional Development Paradigms, February*, 21–38.
- Yuliadi, I. (2012). Kesenjangan Investasi Domestik dalam Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(2), 276–287. <http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1271>